“PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN MELALUI PROGRAM PINJAMAN MODAL USAHA TANPA BUNGA DI KECAMATAN LEMBAH SEGAR KOTA SAWAHLUNTO”

SKRIPSI

Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Sosial Politik Program Studi Ilmu Administrasi Negara Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Negara

Oleh:

BENNY DWI VANDRA
2005 / 64759

PROGRAM STUDI
ILMU ADMINISTRASI NEGARA

JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2012

ABSTRAK

Benny Dwi Vandra. 64759/2005.PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN MELALUI PROGRAM PINJAMAN MODAL USAHA TANPA BUNGA DI KECAMATAN LEMBAH SEGAR KOTA SAWAHLUNTO

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses implementasi Program Pinjaman Modal Usaha Tanpa Bunga Bagi Keluarga Miskin di Kecamatan Lembah Segar, dan dampak Program Pinjaman Modal Usaha Tanpa Bunga Bagi Keluarga Miskin ini terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, karena peneliti memberikan gambaran tentang keadaan sebagaimana mestinya. Pemilihan informan dalam penelitian ini memakai *teknik purposive sampling*. Jenis datanya adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan dapat dikelompokkan dalam 3 tahap yaitu reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa proses implementasi Program Pinjaman Modal Usaha Tanpa Bunga Bagi Keluarga Miskin di Kecamatan Lembah Segar sudah berjalan dengan cukup baik sesuai dengan juknis program ini, namun masih banyak ditemukan usaha masyarakat yang tidak berkembang dan bahkan ada yang gagal sehingga berdampak kepada masyarakat tidak mampu membayar pinjaman begitupun pemanfaatan dana yang pinjaman yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Untuk mencari jalan keluar agar program ini lebih berjalan dengan baik untuk masa yang akan datang, diperlukan pendekatan – pendekatan dari pemerintah untuk menyadarkan masyarakat akan kewajibannya membayar pinjaman dan juga pendampingan dan pembinaan yang berkelanjutan terhadap usaha – usaha yang ditekuni oleh masyarakat miskin agar tidak terjadinya gagal usaha. Kecamatan Lembah Segar telah melakukan suatu terobosan baru untuk meminimalkan tunggakan yang terjadi yaitu dengan cara mempermudah masyarakat mencicil pinjaman baik itu perhari, perminggu maupun perbulan sesuai dengan kemampuan masyarakat sebagai peminjam.

Peneliti menyimpulkan bahwa implementasi Program Pinjaman Modal Usaha Tanpa Bunga Bagi Keluarga Miskin di Kecamatan Lembah Segar telah terlaksana tetapi belum maksimal. Untuk itu diperlukan perbaikan dari semua pihak terkait, bagi aparat pelaksana sebaiknya lebih diintensifkan kepada pemberian pendidikan dan pelatihan yang bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat miskin sehingga masyarakat mampu mengembangkan setiap potensi sumberdaya yang ada dan mampu bersaing didunia usaha.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Pinjaman Modal Usaha Tanpa Bunga di Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto. Shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada arwah Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata satu (S1) program studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Sosial politik Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Unversitas Negeri Padang.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si. Ph.D, selaku Ketua Jurusan Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu-ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dra. Jumiati, M.Si, selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Ibu Dra. Hj. Henni Chandra Gustina selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Nurman. S, M.Si, selaku penguji yang telah banyak memberikan saran dan kritik dalam penyempurnaan skripsi ini.
6. Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si. Ph.D, selaku penguji yang telah banyak memberikan saran dan kritik dalam penyempurnaan skripsi ini.
7. Bapak Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si, selaku penguji yang telah banyak memberikan saran dan kritik dalam penyempurnaan skripsi ini.
8. Bapak Dedi Syahendry,SSTP, selaku kepala Kecamatan Lembah Segar sekaligus ketua Tim Kecamatan dalam pelaksanaan program pinjaman modal usaha tanpa bunga di kecamatan Lembah Segar kota Sawahlunto.
9. Tim Kecamatan dan semua aparat pelaksana kegiatan yang telah mendukung dan membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Orang tua yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis secara moral maupun material serta doa untuk penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan terutama bagi rekan-rekan IAN 2005 yang telah memberikan masukan dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga semua bimbingan, bantuan, masukan, kritikan, dan perhatian yang telah diberikan kepada penulis akan dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang setimpal.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dari penulisan skripsi ini. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan kita semua.

Padang, April 2012

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK ..... **i**

KATA PENGANTAR..... **ii**

DAFTAR ISI..... **v**

DAFTAR TABEL ..... **ix**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi, Pembatasan, dan Perumusan Masalah 10

1. Identifikasi Masalah 10
2. Batasan Masalah 11
3. Perumusan Masalah 11

C. Fokus Penelitian 12

D. Tujuan Penelitian 12

E. Manfaat Penelitian 13

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Teoritis 14

1. Pemberdayaan Masyarakat..... 14
2. Aktor yang Telibat dalam Pemberdayaan Masyarakat 17
3. Pemberdayaan Masyarakat Miskin 20
4. Implementasi Kebijakan Publik 28

5. Analisis Dampak 34

6. Program Pinjaman Modal Usaha Tanpa Bunga Bagi Keluarga Miskin 37

B. Kerangka Konseptual..... 41

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 42

B. Lokasi Penelitian 42

C. Informan Penelitian 43

D. Jenis, Sumber, Teknik dan Alat Pengumpulan Data 45

1. **Jenis dan Sumber Data** 45

a. Data Primer 45

b. Data Sekunder 45

2. **Teknik Pengumpulan Data** 45

a. Observasi Lapangan atau Pengamatan 45

b. Wawancara 46

c. Studi Dokumentasi 46

3. **Alat Pengumpulan Data** 47

E. Uji Keabsahan Data 49

F. Teknik Analisa Data 50

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

1. Deskripsi Umum Kecamatan Lembah Segar 52

a. Letak Geografis 52

b. Penduduk 52

c. Rumah Tangga Miskin 55

B. Temuan Khusus

1. Implementasi Program Pinjaman Modal Usaha Tanpa Bunga Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto 56

a. Mekanisme Penyaluran Dana Pinjaman Modal Usaha Tanpa Bunga…. 58

b. Syarat Penerima Pinjaman 61

c. Pemanfaatan Pinjaman…..... . 62

d. Masa / Jangka Waktu Pinjaman 63

e. Borgh (Jaminan) 64

f. Nilai Pinjaman 65

g. Reward (Penghargaan) 69

2. Dampak Implementasi Program Pinjaman Modal Usaha Tanpa Bunga Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto 75

a. Dampak Sosial Ekonomi…..... . 76

a) Perubahan Dalam Mengelola Usaha..... 76

b) Perubahan Perilaku Menabung…..... . 78

c) Kondisi Fasilitas Tempat Tinggal 79

d) Kelompok yang diuntungkan dan dirugikan 80

b. Tingkat Kemiskinan..... 81

C. Pembahasan

1. Implementasi Program Pinjaman Modal Usaha Tanpa Bunga Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto 83
2. Dampak Implementasi Program Pinjaman Modal Usaha Tanpa Bunga Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto 89

BAB V PENUTUP

a. Kesimpulan 93

b. Saran 94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Nama Informan Penelitian 44

Tabel 3.2 Jenis, Tekhnik dan Alat Pengumpul data 48

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk 53

Tabel 4.2 Kepadatan Penduduk 54

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Miskin 56

Tabel 4.4 Rekapitulasi Dana Pinjaman Modal Usaha Tanpa Bunga 66

Tabel 4.5 Rekapitulasi Dana guliran Pinjaman Modal Usaha Tanpa Bunga 58

Tabel 4.6 Rekapitulasi tunggakan Pinjaman Modal Usaha Tanpa Bunga ... 70

Tabel 4.7 Rasio Jumlah Penduduk Miskin Kecamatan Lembah Segar

Tahun 2006 S/d 2010..... 82

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Krisis ekonomi global masih terus menjadi keprihatinan masyarakat internasional, tidak terkecuali bagi Indonesia yang berdampak seperti penurunan nilai rupiah terhadap dolar AS, dan menurunnya ekspor komoditas alam seperti kelapa sawit, kopi dan batu bara. Kondisi ini akan semakin menyulitkan pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia yang semakin memprihatinkan.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2011 memang telah berkurang 1 juta orang menjadi 30,02 juta orang (12,49 persen) dibandingkan dengan Maret 2010 sebanyak 31,02 juta orang. Namun, angka kemiskinan itu masih terbilang tinggi. (sumber BPS 2011). Yang dimaksud dengan penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Angka garis kemiskinan pada Maret 2011 adalah Rp 233,740,- per kapita per bulan. (sumber BPS 2011)

Akar kemiskinan di Indonesia tidak hanya harus dicari dalam budaya malas bekerja keras tetapi situasi yang menyebabkan seseorang tidak dapat melaksanakan kegiatan produktifnya secara penuh juga harus diperhitungkan. Faktor-faktor kemiskinan adalah gabungan antara faktor internal dan faktor eksternal. Kebijakan pembangunan yang keliru termasuk dalam faktor

eksternal. Korupsi yang menyebabkan berkurangnya alokasi anggaran untuk suatu kegiatan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat miskin juga termasuk faktor eksternal.

Sementara itu, tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya keterampilan, kesehatan yang buruk, serta etos kerja yang rendah, semuanya merupakan faktor internal. Faktor-faktor internal dapat dipicu munculnya oleh faktor-faktor eksternal juga. Kesehatan masyarakat yang buruk adalah pertanda rendahnya gizi masyarakat. Rendahnya gizi masyarakat adalah akibat dari rendahnya pendapatan dan terbatasnya sumber daya alam. Selanjutnya, rendahnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) adalah akibat dari kurangnya pendidikan. Hal yang terakhir ini juga pada gilirannya merupakan akibat dari kurangnya pendapatan. Kurangnya pendapatan merupakan akibat langsung dari keterbatasan lapangan kerja. Dan seterusnya begitu, berputar-putar dalam proses saling terkait. (Dalle Daniel Sulekale, www.emperordeva.wordpress.com di akses 6 januari 2011)

Untuk mengatasi masalah kemiskinan, hal paling mendasar yang harus dilakukan adalah mengupayakan agar pendapatan per kapita masyarakat miskin mengalami peningkatan tiap tahun. Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat miskin ditandai dengan mutu hidup yang tinggi, dengan jumlah kepemilikan alat-alat otomotif, elektronika, dan informatika yang lebih banyak, nutrisi yang lebih baik, perumahan yang tenteram, jaminan kesehatan

yang lebih baik, dan harapan hidup yang lebih panjang. (Hesma Eryani, http://artikel-media.blogspot.com diakses 6 september 2010)

Untuk dapat bangkit dan keluar dari himpitan kemiskinan yang melanda, perlu dikembangkan suatu tatanan masyarakat sosial melalui suatu program pemberdayaan yang bisa membuat masyarakat miskin yang selama ini terbelakang menjadi tahu dan mempunyai kemampuan untuk berkembang serta produktif.

Pemberdayaan masyarakat secara substansi berarti proses memajukan, mengembangkan, dan memperbesar kemampuan masyarakat. Dalam kaitan ini, masyarakat yang ada bukan saja diarahkan pada kemajuan fisik (materi) namun juga pada kemajuan nilai-nilai non materi. Dengan begitu pemberdayaan masyarakat bukan saja membutuhkan SDM (masyarakat atau fasilitator), modal dan sarana, tapi juga membutuhkan nilai-nilai yang jelas, yang akan memandu serta mengorientasikan ke arah mana perubahan akan dilakukan. Masyarakat dalam konteks pemberdayaan berfungsi bukan menjadi obyek tapi menjadi subyek. Merekalah yang secara bersama-sama akan menentukan ke arah mana mereka akan berkembang.

Konsep sederhana tentang pemberdayaan masyarakat, yaitu : suatu proses yang berjalan terus menerus untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Menurut A. M. W Pranarka, konsep dan gerakan pemberdayaan memusatkan perhatian pada kenyataan bahwa manusia ataupun sekelompok manusia dapat mengalami

kendala dan hambatan dalam proses aktualisasi eksistensinya. Maka perhatian gerakan pemberdayaan adalah untuk dapat menunaikan tugas aktualisasi eksistensinya seluas-luasnya dan setinggi-tingginya. (Ony, 1996;263)

Dalam hal ini, Pemerintah sebagai 'agen perubahan' dapat menerapkan kebijakan pemberdayaan masyarakat miskin dengan tiga arah tujuan, yaitu *enabling*, *empowering*, dan *protecting*. *Enabling* maksudnya menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Sedangkan *empowering*, bertujuan untuk memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, yakni dengan menampung berbagai masukan dan menyediakan prasarana dan sarana yang diperlukan. *Protecting*, artinya melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. (www.pemberdayaan.com)

Jika melihat masih cukup besarnya masyarakat miskin di Indonesia ini, bukan berarti pemerintah tidak melakukan apa-apa. Masalah kemiskinan dan kesenjangan pembangunan akan tetap menjadi agenda utama pemerintah pusat dari tahun ke tahun, pemerintah selalu mencanangkan upaya penanggulangan kemiskinan antara lain, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Tahun 2010, dana yang dialokasikan untuk PNPM mencapai Rp 13 triliun yang akan disalurkan ke 6000 Kecamatan lebih. Pada tahun yang sama, telah disiapkan dana program KUR sebesar Rp 100 triliun untuk membantu pembiayaan

usaha kecil yang merupakan 98,9% entitas bisnis di Indonesia. (Dalle Daniel Sulekale, www.emperordeva.wordpress.com di akses 6 januari 2011).

Begitu juga bagi Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota, dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah di Era Reformasi, yang mulai diterapkan berdasarkan UU Nomor 22 tahun 1999 dan disempurnakan dengan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, berisi tentang penyerahan sejumlah wewenang yang semula menjadi urusan pemerintah Pusat kepada pemerintah Daerah, termasuk di dalamnya penanggulangan kemiskinan. Banyak program – program yang telah diluncurkan oleh masing – masing pemerintah daerah diseluruh Indonesia dengan mengunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mengentaskan kemiskinan yang salah satunya adalah Program Pengembangan Ekonomi Kerakyatan**.**

Istilah "ekonomi kerakyatan" sebenarnya tidak ditemukan dalam literatur ekonomi. Dalam literatur ekonomi yang ada adalah pembagian kategori masyarakat berdasarkan pendapatannya. Yaitu masyarakat berpendapatan tinggi dan masyarakat berpendapatan rendah atau miskin. Berdasarkan kategori ini, barulah bisa dibuatkan analisa atas dampak sebuah kebijakkan ekonomi. Sebab kebijakkan ekonomi yang bagaimanapun pastilah memberikan hasil yang berbeda terhadap dua kelompok ini. Banyak literatur ekonomi yang menjelaskan bahwa kelompok kayalah yang akan lebih menikmati kebijakan ekonomi yang bebas *(liberal)* sebab mereka memiliki modal yang bisa mereka pakai untuk menaikkan sumber daya ekonomi yang

mereka kuasai *(kapitalisme)*. Sedangkan kelompok miskin akan menjadi pihak yang dirugikan karena bisa dieksploitasi oleh kelompok kaya ini. Sehingga bisa dipastikan akan muncul keTimpangan di antara kedua kelompok ini. Intinya, kebijakan ini berupaya mengurangi kemiskinan dan keTimpangan melalui pertumbuhan ekonomi yang lebih berpihak secara jelas.

Jadi bisa dikatakan pengembangan ekonomi kerakyatan adalah nama lain dari *Pro-poor growth* yang sengaja dirancang untuk memberikan kesempatan lebih banyak bagi masyarakat miskin untuk terlibat dan menikmati hasil pembangunan. Caranya dengan melibatkan masyarakat miskin dalam kegiatan ekonomi, agar mereka mendapatkan manfaat dari kegiatan ekonomi. Selain itu, kebijakan ini memerlukan dukungan politik yang kuat karena biasanya menyangkut sektor publik yang menyedot dana besar seperti bidang pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, akses kredit atau modal, dan promosi UKM. (Dani, http://danisugiri.wordpress.com diakses 13 januari 2011)

Sawahlunto termasuk salah satu Kota yang melaksanakan Program Pengembangan Ekonomi Kerakyatan guna menekan angka kemiskinan di daerahnya sendiri. Dengan komitmen yang tinggi pemerintah Kota Sawahlunto mengambil kebijakan tentang Program Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang secara sistematis mengupayakan pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Sawahlunto. Program ini tertuang dalam visi dan misi Kota

Sawahlunto sesuai dengan peraturan daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 tahun 2001 :

Visi Kota :

" Sawahlunto tahun 2020 menjadi Kota wisata tambang yang berbudaya"

Misi Kota Sawahlunto :

1) Memelihara dan Mengembangkan Nilai-nilai Dasar Agama dan Adat ditengah-tengah Masyarakat
2) Meningkatkan Fasilitas dan Pelayanan Umum
3) Mengembangkan Objek Wisata Tambang
4) Mengembangkan Seluruh Potensi Kota Yang Dapat Mendorong Berkembangnya Pariwisata

Berdasarkan visi Kota tersebut, maka ditetapkan visi pemerintah Kota untuk lima tahun kedepan (2008-2013) yaitu " Terwujudnya Sawahlunto Menjadi Tempat Yang Lebih Baik Untuk Hidup, Berusaha dan Dikunjungi, Menuju Kota Wisata Tambang ".

Yang mempunyai 4 (empat) konsep utama yaitu : *Kota Wisata, Ekonomi Kerakyatan Berkelanjutan, Kota yang Berbudaya, dan Kota Sejahtera.*

Makna yang terkandung dalam konsep Ekonomi Kerakyatan yang Berkelanjutan :

1. Berkembangnya ekonomi kerakyatan dan sektor riil

2. Terlaksananya intensifikasi, ekstensifikasi dan diversivikasi pemanfaatan lahan sehingga terwujud ketahan pangan
3. Berkembangnya kegiatan pertanian terpadu yang berkelanjutan dengan konsep agribisnis dan agroindustri.
4. Berkembangnya aktivitas ekonomi masyarakat yang mendukung kegiatan pariwisata.

Kota Sawahlunto dikenal sebagai Kota Tambang Batu Bara, namun sejak tahun 2000, produksi batu bara mengalami penurunan, yang mengakibatkan banyak terjadi PHK dan pensiunan dini dikalangan karyawan PT.BA. UPO khususnya dan masyarakat Sawahlunto pada umumnya. Kegiatan tambang batu bara yang sebelumnya menjadi andalan utama dalam menunjang ekonomi rumah tangga masyarakat Kota Sawahlunto tidak lagi dapat diandalkan. Diperlukan alternatif baru sebagai penganti usaha dibidang tambang batu bara agar masyarakat tidak terjerumus dalam kemiskinan melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat antara lain Pengembangan Ekonomi Kerakyatan. Pengembangan ekonomi kerakyatan / sektor riil didasari dengan kondisi ekonomi masyarakat Sawahlunto yang masih memiliki usaha dalam skala mikro dan disamping itu juga sangat berpeluang untuk dikembangkan.

Program Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Sawahlunto diantaranya adalah dengan melaksanakan program Pinjaman lunak kepada masyarakat Kota Sawahlunto yaitu : (1)

Dana Kemitraan, (2) Dana Bergulir, (3) Dana Pinjaman Modal untuk Pemuda, (4) Dana Pinjaman Modal Usaha Tanpa Bunga Bagi Keluarga Miskin, (5) kredit usaha rakyat. (RKPD Kota Sawahlunto 2010)

Yang paling menonjol dalam Implementasi program pinjaman lunak ini adalah Dana Pinjaman Modal Usaha Tanpa Bunga Bagi Keluarga Miskin. hal ini dapat dilihat bahwa program Dana Pinjaman Modal Usaha Tanpa Bunga Bagi Keluarga Miskin memiliki anggaran dana yang lebih besar dari program – program yang lain dan program ini bersentuhan langsung dengan masyarakat miskin di Kota Sawahlunto dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan usaha keluarga miskin, dengan ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan Keluarga miskin di Kota Sawahluto. Pinjaman Modal Usaha Tanpa Bunga Bagi Keluarga Miskin dalam arti bahwa peminjam hanya berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman. Program ini dimulai sejak tahun 2006 dan telah memfasilitasi 870 KK miskin. Total alokasi sebanyak Rp. 2.926.800.000,- dengan tingkat pengembalian 43,48%.

Program Dana Pinjaman Modal Usaha Tanpa Bunga Bagi Keluarga Miskin ini telah dilaksanakan di seluruh Kecamatan di Kota Sawahlunto. Di Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto, program Dana Pinjaman Modal Usaha Tanpa Bunga Bagi Keluarga Miskin ini pada tahun 2010 telah di akses oleh 251 KK miskin (bagian perekonomian dan PM Kota Sawahlunto)

Namun pada kenyataannya, program Dana Pinjaman Modal Usaha Tanpa Bunga Bagi Keluarga Miskin ini belum mencapai hasil yang maksimal bagi pengentasan kemiskinan di Kota Sawahlunto. Hal ini tercermin pada tingkat pengembalian pinjaman yang hanya mencapai 43,48%.(RKPD Kota Sawahlunto 2010). Ini membuktikan bahwa sebagian besar masyarakat miskin tidak mampu mengelola dana yang dipinjam sehingga tidak mampu membayar angsuran pinjaman. Selain itu, juga ditemukan masih banyak usaha masyarakat yang tidak berkembang secara produktif bahkan *gulung tikar* setelah mengakses program pemberdayaan ini. (wawancara dengan staff Bagian Perekonomian dan PM Setdako Sawahlunto tanggal 19 januari 2011). Mengapa hal ini bisa terjadi?, tentu banyak alasan yang mendasarinya yg dapat kita gali.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana proses pelaksanaan program pengembangan ekonomi kerakyatan dalam penelitian yang berjudul "**Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Pinjaman Modal Usaha Tanpa Bunga di Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto".**

B. Identifikasi masalah, pembatasan dan perumusan masalah

1. Identifikasi masalah
   a. Masyarakat yang belum berdaya.
   b. Latar belakang pendidikan masyarakat yang masih rendah.
   c. Rendahnya etos kerja masyarakat.

d. Masih banyak program – program pemberdayaan yang tidak tepat sasaran
e. Kurangnya sosialisasi dan akses informasi masyarakat miskin terhadap program pemberdayaan.
f. Pelaksanaan program yang masih menemui kendala-kendala.
g. Masih banyaknya tunggakan yang terjadi oleh masyarakat miskin penerima bantuan Modal Usaha Tanpa Bunga.

2. Batasan masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus dan dapat mempertajam objek pembahasan maka yang menjadi batas masalah dalam penelitian ini adalah Implementasi Program Pinjaman Modal Usaha Tanpa Bunga dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin dan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto

3. Rumusan masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

a. Bagaimana Implementasi Program Pinjaman Modal Usaha Tanpa Bunga dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin di Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto?

b. Bagaimana dampak Implementasi Program Pinjaman Modal Usaha Tanpa Bunga di Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin?

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian sangat penting ditetapkan sebelum melakukan penelitian menurut Moleong (2002: 297), fokus penelitian adalah penetapan masalah yang menjadi pusat perhatian penelitian, melalui penetapan fokus penelitian akan dapat membatasi studi agar terkonsentrasi, untuk medapatkan informasi yang relevan dengan permasalahan. Sehingga, bagi peneliti penetapan fokus ini akan memudahkan peneliti dalam pengumpulan data. Sehubungan dengan itu, yang menjadi fokus penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Program Pinjaman Modal Usaha Tanpa Bunga dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin di Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto dan Dampak implementasi Program Pinjaman Modal Usaha Tanpa Bunga di Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu :

a. Untuk mengetahui Implementasi Program Pinjaman Modal Usaha Tanpa Bunga dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin di Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto

b. Untuk mengetahui dampak terhadap masyarakat miskin dalam peningkatan kesejahteraannya melalui implementasi Program Pinjaman Modal Usaha Tanpa Bunga di Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto?

E. Manfaat Penelitian.

1. Secara teoritis.

   Untuk pengembangan konsep ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan pemahaman konsep pemberdayaan masyarakat.

2. Secara praktis.

   Sebagai bahan masukan bagi pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam merencanakan strategi pengentasan kemiskinan yang lebih baik di masa mendatang.

3. Sebagai masukan bagi penelitan lanjutan yang ada hubungannya dengan pemberdayaan masyarakat.